

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH – BANGUNAN GEDUNG – MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
2025

PERBUP TABALONG NO. 7, BD 2025/NO. 7, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu adanya pengaturan mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENPUPR No. 1 Tahun 2021; KEPMENPUPR No. 22/KPTS/M/2023; Keputusan Bersama MENPKP, MENPU, MENDAGRI No. 03.HK/KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-4849 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 1 Tahun 2024; PERBUP Tabalong No. 2 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah dan Kriteria Masyarakat Berpendhasilan Rendah.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2025.